

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KESBANG
TAHUN 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara, yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempah dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rangkaian system perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Rencana Kerja OPD sangat penting peranannya dan turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 Provinsi Sumatera Utara dan merupakan tahap kedua dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian akan dibahas bersama – sama dengan BAPELITBANG Kabupaten Padang Lawas Utara dan OPD lain dalam kegiatan Forum OPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja 2025 ini, diharapkan menjadi bahan acuan dalam perumusan program / kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 guna pencapaian target–target kinerja sasaran pembangunan sebagaimana dalam Perubahan Rencana Kerja RKPD 2025.

Gunungtua, 28 Juli 2025

Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



MUZNILELO HALOMOAN HARAHAHAP,S.STP, MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 198302122002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol sampai Tahun Lalu	6
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bakesbangpol	17
3.3 Program dan Kegiatan	18
BAB IV. PENUTUP	39

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 7

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan.....18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Daerah (RPD 4) tahun, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kemudian /badan daerah wajib menjabarkannya ke dalam Perubahan Rencana Kerja (renja) /badan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perubahan Rencana Kerja peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan jangka menengah daerah, dan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten/kota memuat arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi. Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Bappeda meminta masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memuat program kepala daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPD. Kepala Bapelitbang mengkoordinasikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja RKPD menggunakan Perubahan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja RKPD memuat Perubahan Rencana Kerja kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, Perubahan Rencana Kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menunjukkan prakiraan maju.

Perubahan Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah dibahas dalam forum internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan bersama pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan program/kegiatan/sub-kegiatan prioritas pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai bahan pembahasan dalam beberapa tahapan proses selanjutnya yang meliputi forum Perangkat Daerah, Musrenbang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dantahap penyempurnaan/sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan program/kegiatan/sub-kegiatan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politiksebagaimana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Nomenkelatur Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten

- Padang Lawas Utara Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2026.
 14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan, sub-kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Perubahan Rencana Kerja RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan/sub-kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPD, dan RPJPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun tujuannya adalah:

1. Pemenuhan kewajiban sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan Tahun 2025;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Menjadi tolak ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirangkum dalam 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I : menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja meliputi latar belakang perlunya penyusunan renja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Perubahan Rencana Kerja RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan.
- Bab III : menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, yang ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam sektor energi dan sumberdaya mineral.
- Bab IV : Menguraikan Perubahan Rencana Kerja dan kerangka pendanaan perangkat Daerah
- Bab V : Merupakan bab penutup, berisi catatan penting yang menjadi perhatian dalam rangka keberhasilanpelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun lalu

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari periode perencanaan strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2024-2026. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang tertuang ke dalam 6 program dan 26 kegiatan, strategis dan administratif, secara umum dapat dilaksanakan sebagaimana rencana, sesuai pencapaian target kinerja keluaran masing-masing program/kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dari satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan, azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 telah mewakili seluruh kegiatan yang ada. Semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah terlaksana dengan baik, meskipun masih ada program atau kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tercapainya sasaran kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan OPD lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara, yang diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024-2026. (Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara).

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja a RPJMD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja a Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2024 s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		II I		I V								
					K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		1 1		1 2		13		14 =7+13		1500,00 %		16
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																							
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																							
1	â€¢ Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks Persepsi Korupsi	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			0	769.281.891		724.831.800	10	109.010.984	120	44.087.062	-	-	-	-	443	361.890.763	1.102	1.131.172.654	48,86%	71,34 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1,1		8.01.01.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		422	148.947.246		87.083.000	10	27.161.600	120	44.087.062	-	-	-	-	130	71.248.662	552	220.195.908	72,92%	84,66%	
1.1.1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	50.988.100	3	9.530.500	3	9.530.500	-	-					3	9.530.500	6	60.518.600	100,00%	100,00%	
1.1.2		8.01.01.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2	7.188.300	4	3.458.000	4	3.458.000	-	-					4	3.458.000	6	10.646.300	100,00%	100,00%	
1.1.3		8.01.01.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	11.052.000	1	6.509.100	1	6.505.900	-	-					1	6.505.900	2	17.557.900	100,00%	99,95%	
			penyediaan bahan logistik kantor					2	7.696.000	2	7.667.200	-	-					2	7.667.200	2	7.667.200	100,00%	99,63%	
1.1.4		8.01.01.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		15	10.000.000	40	10.000.000			-	2.500.000					-	2.500.000	15	12.500.000	0,00%	25,00%	
1.1.5		8.01.01.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		401	69.718.846	320	49.889.400			120	41.587.062					120	41.587.062	521	111.305.908	37,50%	83,36%	
1,2		8.01.01.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara, Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara, Jumlah Rumah Gedung Kantor Yang Dipelihara		29	145.481.500		173.620.000		4.470.000							1	94.620.000	30	240.101.500	20,00%	67,87%	

1.2.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5	126.231.500	5	139.420.000	1	4.470.000	-	90.150.000					1	94.620.000	6	220.851.500	20,00%	67,87%	
1.2.2		8.01.01.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			24	19.250.000										-	-	24	19.250.000				
1.2.3			pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya						1	34.200.000								-	-	-	-	0,00%	0		
1,4		8.01.01.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			208	474.853.145		464.128.800		77.379.384						312	196.022.101	520	670.875.246	53,66%	61,51%		
1.4.1		8.01.01.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8	4.040.000	12	3.500.000	3	3.000.000	3	500.000				6	3.500.000	14	7.540.000	50,00%	100,00%		
1.4.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			9	56.537.745	12	49.360.000	3	7.834.584	3	13.325.517				6	21.160.101	15	77.697.846	50,00%	42,87%		
1.4.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			191	414.275.400	492	411.268.800	100	66.544.800	200	104.817.200				300	171.362.000	491	585.637.400	60,98%	41,67%		
Rata-Rata Capaian Kinerja																			48,86%						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi						

2	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan indikator pembangunan yakni predikat akuntabilitas kinerja			0	1.088.071.013		614.942.180		20.662.000		144.256.746				800	143.126.346	1.600	1.231.197.359	44,44%	23,27%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,1		8.01.02.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa			800	1.088.071.013		614.942.180		20.662.000		144.256.746				800	143.126.346	1.600	1.231.197.359	44,44%	23,27%	
2.1.1			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			800	1.088.071.013	1.800	614.942.180	800	20.662.000		122.464.346				800	143.126.346	1.600	1.231.197.359	44,44%	23,27%	
2.1.2		8.01.02.2	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										12	21.792.400										
Rata-Rata Capaian Kinerja																			44,44%					
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi					

a																								
3	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan indikator pembangunan yakni predikta akuntabilitas kinerja			0	5.350.008.220		1.390.577.000	11	-						11	-	26	55.372.259.254	100,00 %	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,1		8.01.03.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Budaya Politik	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			15	5.350.008.220		1.390.577.000	11	-						11	-	26	55.372.259.254	100,00 %	0,00%	

3.1.1			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Ke	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum			15	55.372.259.254	11	1.390.577.000	11	-						11	-	26	55.372.259.254	100,00 %	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,00%					
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi					
5	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan indikator pembangunan yakni predikat akuntabilitas kinerja			0	178.621.601		16.607.000	12	-						12	-	13	178.621.601	100,00 %	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.1		8.01.05.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya			1	178.621.601		16.607.000	12	-						12	-	13	178.621.601	100,00 %	0,00%	

5.1.1			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang			1	178.621.601	12	16.607.000	12	-						12	-	13	178.621.601	100,00 %	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,00%					
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi					
6	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan indikator pembangunan yakni predikat akuntabilitas kinerja			0	3.599.683.647		1.516.607.000	-	-		37.607.000				100	16.607.000	155	14.164.249.900	100,00 %	1,10%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.1		8.01.06.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial			55	3.599.683.647		1.516.607.000	-	-		37.607.000				100	16.607.000	155	14.164.249.900	100,00 %	1,10%	

6.1.1			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang			55	14.147.642.900	100	1.516.607.000	-	-	100	16.607.000					100	16.607.000	155	14.164.249.900	100,00 %	1,10%	
6.1.2			pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik	Pelaksanaan koordinasi Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial									2	21.000.000											
Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,00%						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi						

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Padang Lawas Utara dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Padang Lawas Utara agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD.

Berkenaan dengan rencana program, terdapat program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Penghayatan dan Pengamalan Nilai Pancasila
2. Kinerja Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) di Daerah
3. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di Daerah
4. Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) daerah yang efektif;
5. Pendidikan politik masyarakat di Daerah;
6. Pendidikan Politik bagi pengurus Partai Politik
7. Peningkatan Kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam pelayanan pendaftaran Ormas;
8. Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengawasan Ormas;
9. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
10. Dukungan sukses persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas meningkatkan keamanan dan kenyamanan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai tersebut diatas, maka Sasaran Strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

- 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan yang Prima Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET			SUMBER DATA																																																																									
1	2	3	4	5	6	2024	2025	2026	7																																																																									
	Tujuan RPD :	Sasaran RPD :	IKU RPD :																																																																															
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan yang Prima Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Nilai AKIP Perangkat daerah	Nilai evaluasi akip adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik	<table><tr><th rowspan="3">Komponen</th><th colspan="4">Sub-Komponen</th><th rowspan="3">Total Skor</th></tr><tr><th>Sub-Komponen 1</th><th>Sub-Komponen 2</th><th>Sub-Komponen 3</th><th>Sub-Komponen 4</th></tr><tr><th>20%</th><th>30%</th><th>30%</th><th>20%</th></tr><tr><td>Penerbitan Kriteria</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td><td rowspan="4">64,32</td><td rowspan="4">69,32</td><td rowspan="4">74,32</td><td rowspan="4">Tim Evaluator</td></tr><tr><td>Pengisian Kriteria</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaksanaan Kriteria</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Abstraksi Kriteria</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Nilai Abstraksi Kriteria</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2. Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil survei dari kegiatan survei kepuasan masyarakat/pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik</td><td>$IKM = \frac{\text{Jumlah Total dari Nilai Persepsi per Unsor}}{\text{Total Unsor yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$</td><td>78,50</td><td>80.50</td><td>82.50</td><td>Tim Evaluator</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Persentase penurunan terjadinya konflik sosial</td><td>Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial</td><td>$\frac{\text{Jumlah Konflik yang Terjadi di Tahun N}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi di Tahun N-1}} \times 100 \%$</td><td>60%</td><td>55%</td><td>50%</td><td>Polres Tapstel, Kajari, Dandim dan Bidang Kewaspadaan Nasional Kerbangpol Kab.Paluta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik</td><td>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik</td><td>$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Ormas Dan Pargol}}{\text{Jumlah Ormas dan Pargol yang terdaftar di Kerbangpol}} \times 100 \%$</td><td>75 %</td><td>80%</td><td>80%</td><td>Bidang Politik dalam negeri dan bidang Ekonomi dan Ormas Kerbangpol Kab.Paluta</td></tr></table>	Komponen	Sub-Komponen				Total Skor	Sub-Komponen 1	Sub-Komponen 2	Sub-Komponen 3	Sub-Komponen 4	20%	30%	30%	20%	Penerbitan Kriteria	6	9	15	30	64,32	69,32	74,32	Tim Evaluator	Pengisian Kriteria	6	9	15	30	Pelaksanaan Kriteria	3	4,5	7,5	15	Abstraksi Kriteria	5	7,5	12,5	25	Nilai Abstraksi Kriteria	20	30	50	100								2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil survei dari kegiatan survei kepuasan masyarakat/pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik	$IKM = \frac{\text{Jumlah Total dari Nilai Persepsi per Unsor}}{\text{Total Unsor yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	78,50	80.50	82.50	Tim Evaluator				Persentase penurunan terjadinya konflik sosial	Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang Terjadi di Tahun N}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi di Tahun N-1}} \times 100 \%$	60%	55%	50%	Polres Tapstel, Kajari, Dandim dan Bidang Kewaspadaan Nasional Kerbangpol Kab.Paluta				Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Ormas Dan Pargol}}{\text{Jumlah Ormas dan Pargol yang terdaftar di Kerbangpol}} \times 100 \%$	75 %	80%	80%	Bidang Politik dalam negeri dan bidang Ekonomi dan Ormas Kerbangpol Kab.Paluta
			Komponen	Sub-Komponen				Total Skor																																																																										
				Sub-Komponen 1	Sub-Komponen 2		Sub-Komponen 3		Sub-Komponen 4																																																																									
20%	30%	30%		20%																																																																														
Penerbitan Kriteria	6	9	15	30	64,32	69,32	74,32	Tim Evaluator																																																																										
Pengisian Kriteria	6	9	15	30																																																																														
Pelaksanaan Kriteria	3	4,5	7,5	15																																																																														
Abstraksi Kriteria	5	7,5	12,5	25																																																																														
Nilai Abstraksi Kriteria	20	30	50	100																																																																														
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil survei dari kegiatan survei kepuasan masyarakat/pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik	$IKM = \frac{\text{Jumlah Total dari Nilai Persepsi per Unsor}}{\text{Total Unsor yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	78,50	80.50	82.50	Tim Evaluator																																																																									
			Persentase penurunan terjadinya konflik sosial	Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang Terjadi di Tahun N}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi di Tahun N-1}} \times 100 \%$	60%	55%	50%	Polres Tapstel, Kajari, Dandim dan Bidang Kewaspadaan Nasional Kerbangpol Kab.Paluta																																																																									
			Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Ormas Dan Pargol}}{\text{Jumlah Ormas dan Pargol yang terdaftar di Kerbangpol}} \times 100 \%$	75 %	80%	80%	Bidang Politik dalam negeri dan bidang Ekonomi dan Ormas Kerbangpol Kab.Paluta																																																																									

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan dan sub-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka program yang akan dilakukan adalah: (Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara).

TABEL T-C.33
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO		KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STRA OPD	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
								TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LO KASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
								SEBE LUM	SESU DAH	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NA SIONAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								6.735.456 .217,00	6.748.483 .039,00	6.970.276 .875,00	234.820.658,0 0						5.566.282 .902,00		
	8	UNSUR PEMERINT AHAN UMUM							6.735.456 .217,00	6.748.483 .039,00	6.970.276 .875,00	234.820.658,0 0							5.566.282 .902,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							6.735.456 .217,00	6.748.483 .039,00	6.970.276 .875,00	234.820.658,0 0							5.566.282 .902,00		
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Nilai AKIP				-	BB Predi kat	3.591.346 .137,00	2.777.517 .459,00	2.521.805 .595,00	- 419.573.235,0 0							3.171.772 .902,00		
	8.01.01.2.0 1	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1 Doku men	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperk uat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa	Pelaks anaan Reform asi Birokra si Pelaks anaan Reform asi Birokra si	jumlah dokumen Perencan aan, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah		5.000.000 ,00	BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK	

															n gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Hutalo mbang	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Bakesbangpol				3 Sub Kegiatan	97 Persen	1.751.725.337,00	1.767.415.659,00	1.731.308.295,00	-20.417.042,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase realisasi anggaran Bakesbangpol		1.876.802.802,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				192 Orang / bulan	192 Orang / bulan	1.751.725.337,00	1.767.415.659,00	1.731.308.295,00	-20.417.042,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.876.802.802,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

															dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Sub Kegiatan	3 Paket	118.380.000,00	23.616.000,00	0,00	- 118.380.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	118.380.000,00	23.616.000,00	0,00	- 118.380.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian				6 Sub Kegiatan	6 Dokumen	260.453.000,00	164.847.000,00	109.998.500,00	- 150.454.500,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		144.534.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.464.000,00	21.274.500,00	36.026.800,00	- 34.437.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.458.000,00	3.458.000,00	3.458.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			8.500.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.036.000,00	7.696.000,00	7.696.000,00	-2.340.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.335.000,00	6.509.100,00	6.509.100,00	-6.825.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			11.034.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	40 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				320 Laporan	320 Laporan	153.160.000,00	115.909.400,00	46.308.600,00	- 106.851.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6 Sub Kegiatan	1 Unit	522.705.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	- 479.955.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	372.705.000,00	0,00	0,00	- 372.705.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	- 107.250.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

															dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan				3 Sub Kegiatan	3 Laporan	661.868.800,00	605.268.800,00	464.128.800,00	-197.740.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		615.435.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lapor an	12 Lapor an	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	3.500.000 ,00	-6.500.000,00	Kab. Padan g Lawas Utara, Padan g Bolak, Pasar Gunun g Tua	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperk uat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilitas.	Pelaks anaan Reform asi Birokra si Pelaks anaan Reform asi Birokra si			10.000.00 0,00	BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapor an	12 Lapor an	51.960.00 0,00	49.360.00 0,00	49.360.00 0,00	-2.600.000,00	Kab. Padan g Lawas Utara, Padan g Bolak, Pasar Gunun g Tua	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperk uat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial	Pelaks anaan Reform asi Birokra si Pelaks anaan Reform asi Birokra si			48.960.00 0,00	BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK

															dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	8.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				492 Laporan	492 Laporan	599.908.800,00	545.908.800,00	411.268.800,00	188.640.000,00	-	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			556.475.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang				3 Sub Kegiatan	6 Unit	276.214.000,00	173.620.000,00	173.620.000,00	102.594.000,00	-			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi	jumlah pemeliharaan barang		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																asi Birokrasi				
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	105.214.000,00	139.420.000,00	139.420.000,00	34.206.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	171.000.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	136.800.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE CAPAIAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				100 Persen	100 Persen	921.624.480,00	693.548.580,00	1.182.819.280,00	-191.624.480,00							730.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	921.624.480,00	693.548.580,00	1.182.819.280,00	261.194.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan		730.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																	Karakter Kebangs aan			
	8.01.02.2.0 1.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				12 Doku men	2 Doku men	50.298.00 0,00	21.792.40 0,00	21.792.40 0,00	- 28.505.600,00	Kab. Padan g Lawas Utara, Padan g Bolak, Pasar Gunun g Tua	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi , dan hak asasi manusia (HAM).	Pelaks anaan Reform asi Birokra si Pelaks anaan Reform asi Birokra si			80.000.00 0,00	BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK
	8.01.02.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				1800 Orang	2500 Orang	871.326.4 80,00	671.756.1 80,00	1.161.026 .880,00	289.700.400,0 0	Kab. Padan g Lawas Utara, Padan g Bolak, Pasar Gunun g Tua	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi , dan hak asasi manusia (HAM).	Pelaks anaan Reform asi Birokra si Pelaks anaan Reform asi Birokra si			650.000.0 00,00	BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK
3,	8.01.03	PROGRAM PENINGKAT AN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIK	PERSENTA SE CAPAIAN PENINGKAT AN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA				100 Perse n	100 Perse n	1.606.012 .000,00	1.504.572 .400,00	1.390.577 .000,00	- 171.502.000,0 0							1.434.510 .000,00	

		N MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1.606.012.000,00	1.504.572.400,00	1.390.577.000,00	- 215.435.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.434.510.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			

			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				11 Dokumen	15 Dokumen	1.606.012.000,00	1.504.572.400,00	1.390.577.000,00	215.435.000,00	-	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasargunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1.434.510.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				100 Perse	100 Perse	128.974.800,00	13.319.800,00	23.465.200,00	98.974.800,00	-								30.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>				3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	128.974.800,00	13.319.800,00	23.465.200,00	105.509.600,00	-			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Kemasyarakatan				
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	128.974.800,00	13.319.800,00	23.465.200,00	- 105.509.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,	PERSENTASE CAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG				100 Persen	100 Persen	262.648.000,00	179.762.400,00	284.602.800,00	- 182.648.000,00							80.000.000,00	

		DAN BUDAYA	EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA																	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya				3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	262.648.000,00	179.762.400,00	284.602.800,00	21.954.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	35.814.000,00	29.762.400,00	16.607.000,00	- 19.207.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	300 Orang	226.834.000,00	150.000.000,00	267.995.800,00	41.161.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				100 Persen	100 Persen	224.850.800,00	1.579.762.400,00	1.567.007.000,00	- 104.850.800,00							120.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	224.850.800,00	1.579.762.400,00	1.567.007.000,00	1.342.156.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasemb	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

														ada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		dan Penangan Konflik Sosial				
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	40.114.000,00	1.529.362.400,00	1.516.607.000,00	1.476.493.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,				200 Orang	200 Orang	184.736.800,00	50.400.000,00	50.400.000,00	- 134.336.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Pasar Gunung Tua	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Kewaspadaa n Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah											pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	J U M L A H							6.735.456 .217,00	6.748.483 .039,00	6.970.276 .875,00	179.614.496.6 08,00							5.566.282 .902,00	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan komitmen dan arah bagi seluruh aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Renja yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan harus dijadikan sebagai pedoman dan gerak langkah dalam melaksanakan tugas untuk itu integritas dan profesional sumber daya manusia harus menjadi persyaratan utama.

Akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan karena Perubahan Rencana Kerja saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan kita sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun ini. Semoga Perubahan Rencana Kerja dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait.

Gunungtua, 28 Juli 2025

Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



MUZNILELO HALOMOAN HARAHAHAP, S.STP, MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 198302122002121001